



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 842/XI/2014

IV/NOVEMBER 2014



Kesepakatan Islah Dua Koalisi Ditandatangani



Kesepakatan Islah Dua Koalisi Ditandatangani

Kesepakatan islah dua kubu koalisi di DPR akhirnya ditandatangani. Surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Dengan penandatanganan kesepakatan ini tak ada lagi perseteruan di DPR.

Senin siang (17/11) menjadi hari bersejarah bagi DPR, karena dua kubu yang selama ini berseteru dipertemukan kembali untuk menandatangani kesepakatan penting menyangkut pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan upaya mengubah UU No.17/2014 tentang MD3. Delegasi KIH diwakili Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Sementara KMP diwakili Hatta Rajasa dan Idrus Marham.

Pertemuan tersebut dihadiri secara lengkap oleh Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi. Pertemuan dibuka oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Setelah itu, surat kesepakatan langsung ditandatangani oleh dua kubu koalisi. Lalu secara berturut-turut



Penandatanganan kesepakatan damai antara KIH dan KMP disaksikan Pimpinan DPR

ikut menandatangani para pimpinan fraksi dan terakhir para Pimpinan DPR. Acara pun berlangsung singkat.

Setelah hasil kesepakatan ini resmi ditandatangani, tak ada lagi dikotomi KIH dan KMP. DPR akan segera bekerja

sesuai mandatnya, karena keanggotaan DPR sudah lengkap. Penyatuan persepsi sudah dilakukan lewat pertemuan lobi berkali-kali antara dua kubu koalisi. Hasilnya, inilah DPR yang utuh tanpa terbelah lagi. (mh)/foto:naefurodji/parle/hr.

Empat Poin, Kunci Damaikan Dua Kubu DPR

Juru runding dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa mengungkapkan, demokrasi kita meniscayakan partai politik sebagai ujung tombak demokrasi dan memainkan peran yang sentral. Oleh sebab itu maka pihaknya berusaha keras mencari solusi terbaik dengan melepaskan kepentingan-kepentingan sempit untuk kepentingan

lebih besar yaitu rakyat, bangsa dan negara tercinta.

Hal itu disampaikan Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum PAN pada penandatanganan islah KMP dan KIH di Gedung DPR, Senin (17/11). Disaksikan Ketua DPR Setya Novanto dan pimpinan Dewan lainnya serta tokoh-tokoh

dua kubu, Hatta menjelaskan, bersama Pramono Anung, Idrus Marham dan Olly Dondokambey sepakat 4 poin penting dahulu yang harus dikedepankan.

Pertama, melepaskan kepentingan sempit sebelum membahas kepentingan bangsa dan negara di atas

kepentingan lainnya. Selanjutnya, dia tekankan *mutual respect*, saling menghormati, menghargai, baik kawan-kawan di DPR yang tergabung dalam fraksi KMP maupun KIH.

Yang ketiga, ujar Hatta, menekankan untuk membangun *trust*- saling percaya, karena inilah bibit yang paling baik menyemai untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada. Dan yang keempat, dia mengajak dan bertekad agar DPR cepat berfungsi dengan baik sehingga kita dapat bekerja, mengundang mitra-mitra pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak. “Oleh sebab itulah, akhirnya tercapai kesepakatan,” ungkap Hatta.

Sebagaimana realitas politik, akhirnya ini memang ada perbedaan pandangan sehingga menimbulkan DPR belum bisa melaksanakan fungsinya secara efektif. Disinilah pentingnya mencari solusi untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lain.

Menanggapi pertanyaan mengapa penandatanganan islak di DPR, Hatta menjelaskan, sebetulnya dimana saja bisa, bisa di suatu tempat, bisa di mana saja, akan tetapi sebaiknya di rumah rakyat. “Karena menurut kami, Dewan ini adalah rumah rakyat dan kami bersepakat menandatangani seluruh



Pramono Anung dan Hatta Rajasa membubuhkan tanda tangan kesepakatan damai

prosesnya akan berpindah ke fraksi-fraksi di DPR-RI,” ungkapnya.

Karena itu, setelah penandatanganan kesepakatan, maka fraksi-fraksi mem-*follow-up* sebagai konsekuensi kesepahaman tersebut. Sama sekali tidak ada yang dilanggar terhadap proses yang dilaksanakan pada hari ini.

“Barangkali ini bagian dari sejarah, dimana kita menyelesaikan sesuatu potensial problem yang bisa membuat stagnya perjalanan Dewan kita apabila tidak bisa diselesaikan dengan

tuntas,” tegasnya.

Peristiwa ini lanjut Hatta, bukan pekerjaan Pramono, Hatta Idrus Marham ataupun Olly, tetapi ini kerja seluruh anggota Dewan karena yakin semua anggota DPR mempunyai keinginan dan kesadaran bersama untuk menuntaskan persoalan ini dan melepaskan kepentingan sempit. “Itulah sebabnya, persoalan ini menjadi lebih cepat selesai dan kesadaran bersama secara kolektif untuk bekerja lebih baik,” pungkash Hatta Rajasa. (mp)/
foto:naefurodji/parle/hr

Penandatanganan Islak Dua Kubu DPR, Pembelajaran Politisi Muda



Juru runding KIH Pramono Anung

Penandatanganan rekonsiliasi dua koalisi DPR merupakan pembelajaran yang baik termasuk pembelajaran bagi politisi muda. Pada suatu hari kalau terjadi *stag* atau *great lock*, maka dalam menyelesaikan persoalan, ego dihilangkan. Begitu pula statemen-statemen keras supaya dikurangi, misalnya ‘dikasih hati minta jantung’.

Hal itu dikatakan politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung yang juga juru runding kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Ruang Pustaka Loka Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11).

Dalam menyelesaikan masalah itu, lanjut Pram panggilan akrab mantan Wakil Ketua DPR ini, memerlukan pendewasaan bersama, tanpa melihat siapa yang paling berjasa. Untuk mengurai benang kusut ini tidak gampang, memerlukan

kepercayaan, kebersamaan, kadang-kadang juga memerlukan kerendahan hati.

Lebih lanjut dia mengatakan, ada hal yang tidak bisa kita nafikan bahwa peristiwa politik ini mungkin pertama kali dalam sejarah republik ini yang disebut *great lock* –mengunci karena aturan main tata tertib yang kita buat sendiri. Peristiwa itu juga kita sadari sepenuhnya sulit diselesaikan secara formal di lembaga DPR.

Menanggapi penyelesaian revisi UU MD 3 yang ditarget selesai sebelum tanggal 5 Desember, Pramono mengatakan DPR periode lalu memiliki pengalaman menyelesaikan UU kurang dari dua minggu yaitu UU Kelautan dan UU Sukuk. Apalagi telah ada kesepakatan bersama maka revisi UU MD

3 bisa diselesaikan tepat waktu.

Yang paling penting adalah harus ada itikad baik dari pemerintah, karena yang menyusun UU adalah pemerintah maka dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan pemerintah agar revisi UU 17/2014 ini dapat segera bisa diselesaikan.

Kembali Pram mengatakan bahwa proses penyelesaian dua kubu DPR cukup melelahkan. “Saya bertemu Pak Hatta dalam sebulan ini mungkin lebih sering dibanding ketemu menantunya, walaupun sama-sama pimpinan partai. Karena kita sama-sama bertekad ingin menyelesaikan revisi UU MD 3 sehingga DPR segera bisa bekerja,” kata Pram menambahkan. (mp)/foto:naefudodji/parle/hr.

Ketua DPR : Ini Forum Yang Ditunggu Rakyat

Ketua DPR RI Setya Novanto memuji hasil kesepakatan yang ditandatangani dua kubu koalisi yang selama ini berseteru di DPR. Forum pertemuan itu sangat ditunggu rakyat, agar DPR kembali utuh dan bisa bekerja kembali untuk rakyat.

“Forum ini ditunggu dan diharapkan oleh kita semua termasuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, setelah melalui proses komunikasi yang konstruktif dalam semangat musyawarah dan mufakat antara semua komponen di DPR dan juga pimpinan-pimpinan partai politik,” kata Novanto saat membuka pertemuan tersebut di Gedung Nusantara IV, Senin (17/11).

Surat kesepakatan bersama yang menyatukan kembali dua kubu koalisi (KIH dan KMP) ditandatangani oleh masing-masing perwakilan. Hadir dalam pertemuan tersebut Pramono Anung dan Olly Dondokambey dari KIH. Sementara dari pihak KMP hadir Hatta Rajasa dan Idrus Marham. Semua pimpinan fraksi dan komisi juga ikut hadir. Selain perwakilan KIH dan KMP yang menandatangani kesepakatan, semua pimpinan DPR dan fraksi juga ikut membubuhkan tanda tangannya.

Lebih lanjut Novanto mengatakan, kesepakatan yang telah dicapai tentu mengedepankan kepentingan rakyat dengan suasana kekeluargaan. Setelah ini tak ada lagi yang mengatasnamakan KIH atau KMP. “Yang ada adalah



Ketua DPR membuka pertemuan KIH dan KMP di DPR

keluarga besar DPR RI,” ujar Novanto lagi.

Ditambahkan Novanto, pihaknya berterima kasih kepada semua pihak yang tanpa lelah terus bermusyawarah untuk mendapatkan titik temu. Salah satu yang disepakati kedua kubu adalah perubahan beberapa pasal dalam UU No.17/2014 tentang MD3 untuk mengakomodir pembagian kursi pimpinan secara proporsional ke semua fraksi yang ada.

“Selaku Ketua DPR saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan kesepakatan ini. Dengan demikian

mulai hari ini kita akan fokus melakukan tugas dan fungsi kita sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yang nantinya akan diawali dengan melakukan perubahan terhadap beberapa pasal UU No.17/2014 tentang MD3.” Agenda perubahan beberapa pasal dalam UU MD3 akan selesai sebelum tanggal 5 Desember 2014.

Novanto berharap, etika hubungan eksekutif dan legislatif akan kembali dibangun berdasarkan mekanisme *check and balances* dengan saling menghargai secara proporsional sesuai posisi masing-masing. (mh)/foto:andri/parle/iw.



Kenaikan BBM Bentuk Liberalisasi Migas

Kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan bentuk liberalisasi hilir migas Indonesia. Liberalisasi ini menyempurnakan liberalisasi sebelumnya di sektor hulu. Swasta diberikan peran yang jauh lebih besar dari pada peran negara.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan (F-Gerindra) menegaskan hal tersebut, Kamis (20/11). “Kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (niaga dan distribusi), setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan.”

Kebijakan ini, kata Heri, tentu akan menyengsarakan rakyat yang sebelumnya pemilik sumber daya alam itu sendiri. Liberalisasi dengan menaikkan harga BBM merupakan pemenuhan



Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan

atas tuntutan pihak asing dengan mengenyampingkan aspirasi rakyat. Dengan menaikkan harga BBM, berarti kesenjangan harga antara SPBU lokal dan SPBU asing kian terkikis.

“Kita bisa saksikan beberapa SPBU asing seperti SHELL, PETRONAS, dan TOTAL yang selama ini sepi pembeli, karena harga BBM yang mereka jual lebih tinggi daripada Pertamina. Dengan harga BBM yang sudah dinaikkan, maka SPBU asing itu nantinya akan berpesta karena konsumen akan beralih ke mereka dengan perbedaan harga yang tidak lagi mencolok,” ungkap Heri.

Menurut Heri, perusahaan minyak asing akan terus berupaya menguasai hilir (eceran) migas di Indonesia. Ini merupakan bentuk lain dari penjajahan asing di Tanah Air. “Kebijakan cabut subsidi, privatisasi, deregulasi, dan pasar bebas, memang sudah menjadi misi yang mereka bawa untuk tetap menempatkan Indonesia di bawah penguasaan asing,” kata Heri. (mh), foto : iwan armanias/parle/hr.

DPRD Purworejo Konsultasi Prolegda

Deputi Perundang-undangan (PUU) Setjen DPR RI, K Jhonson Rajagukguk mengatakan bahwa dalam pembentukan program legislasi harus ada sinergi antara pusat dan daerah. Hal tersebut diungkapkan Jhonson usai menerima Kunjungan Konsultasi DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (27/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Jadi kedatangan para anggota DPRD Purworejo ini lebih kepada studi komparasi untuk melihat bagaimana hubungan antar setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Dimana dalam pembentukan program legislasi itu perlu sebuah sinergi antara pusat dan daerah. Dengan kata lain, penting bagi daerah mengetahui bagaimana program legislasi nasional. Karena sejatinya yang membedakannya hanya ruang lingkup atau wilayah hukumnya saja,” jelas Jhonson.

Sementara itu Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Purworejo, Ajeng Dewi Purnamasari mengatakan bahwa tanggal 24 November mendatang DPRD Purworejo akan menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Pihaknya, kata Ajeng, perlu masukan terkait dasar hukum apa saja yang bisa mendasari penyusunan prolegda tersebut. Karena diakuinya, sebagian besar anggota Baleg DPRD Purworejo notabene merupakan orang yang baru terpilih menjadi anggota DPRD, sehingga belum memiliki pengalaman dalam menyusun Prolegda.



Deputi PUU Jhonson Rajagukguk memberikan cendera mata kepada Ketua Baleg DPRD Purworejo

Dijelaskan Jhonson bahwa sejak reformasi dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan digunakan UU No.10 Tahun 2004, yang kemudian diamandemen menjadi UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Prolegnas disusun oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah. Begitupun dengan Prolegda yang disusun oleh DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota

bersama dengan Pemerintah Daerah.

Ditambahkannya, sejatinya dalam penyusunan Prolegnas atau Prolegda tidak semata-mata karena berdasarkan target kuantitas atau jumlah produk perundang-undangan yang dihasilkan, melainkan juga harus didasarkan pada kenyataan yang ada atau melihat pada

rasional. Karena percuma juga penerapan target prolegnas atau prolegda dengan jumlah yang sangat banyak namun kenyataannya dalam setahun hanya mampu menghasilkan jumlah perundang-undangan jauh dibawah target yang ditetapkan.

Pada kesempatan itu, Deputi Per-

undang-undangan Setjen DPR RI juga mengingatkan bahwa naskah akademik menjadi sebuah keharusan dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Dimana naskah akademik akan menggambarkan pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan. (Ayu) foto: andry/parle/hr.

Calon Polwan Harus Mendapat Hak Jawab

Anggota Komisi III DPR RI Almuzamil Yusuf mendukung wacana perlunya tes kesehatan menyeluruh termasuk tes keperawanan atau keperjakaan bagi calon polisi laki-laki maupun wanita. Hal ini menurutnya penting sebagai upaya menemukan penegak hukum yang unggul.

Bagi politisi FPKS ini tes keperawanan bagi calon Polwan adalah salah satu cara untuk mengetahui kemungkinan adanya jejak buruk calon penegak hukum. Cara lain bisa dengan investigasi lapangan atau menggunakan *lie detector* mengonfirmasi pengakuan calon.

Namun ia mengingatkan dalam setiap pengujian ini Polri harus menyiapkan mekanisme hak jawab. "Hak jawab

ini penting untuk memberikan ruang klarifikasi kepada calon polwan jika dia tidak pernah terlibat dalam pergaulan bebas atau pernah berhubungan di luar nikah," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (19/11/14).

Lebih jauh wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung ini menyebut tes khusus ini harus dilakukan hati-hati, tidak menyakiti dan menjaga kehormatan para calon. Pemeriksaan harus dilakukan oleh bidan atau dokter ahli perempuan.

Menurutnya tantangan penegakan hukum sekarang ini semakin kompleks sehingga Polri sudah sepatutnya menyiapkan proses penyaringan kandidat yang terus diperbaiki kualitasnya. "Hu-



Anggota Komisi III DPR RI Almuzamil Yusuf

kum itu harus ditegakkan oleh penegak hukum yang punya moralitas tinggi. Bersih dari pergaulan bebas, korupsi, narkoba, dan catatan kejahatan lainnya. Tentu harus memiliki inteligensi di atas rata-rata," demikian Muzammil. (iky)/foto:naefurodji/parle/iw.

DPR Apresiasi Langkah DPRD DKI Jakarta Konsultasi Ke MA



Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa Kamal

Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa Kamal mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta de-

ngan meminta konsultasi kepada MA dan kemudian akan mendaftarkan ke PTUN terkait pelantikan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Itu adalah langkah-langkah yang patut dihargai sebagai bentuk taat azas dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, berkonstitusi, sehingga kita tidak mengambil langkah-langkah diluar yang kemudian mendatangkan perdebatan dan ekses di tengah masyarakat yang kita tidak harapkan bersama," kata Mustafa Kamal saat Komisi II DPR beraudiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu, (19/11).

Lebih lanjut dirinya juga mengapre-

siasi, penjelasan yang disampaikan DPRD DKI Jakarta, dimana dalam penjelasan tersebut tidak ada masalah pribadi dengan Basuki Tjahja Purnama. "Tidak ada persoalan personal, dan saya kira dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan ini menjadi suatu hal yang menyejukkan," jelasnya.

Terkait masukan dalam konsultasi kali ini, Komisi II DPR menurut Mustafa akan memproses semua masukan-masukan yang ada melalui prosedur yang berlaku, "Ada MD3, ada tata tertib, yang kemudian kita akan sepakati bersama untuk mengambil langkah-langkah atas apa yang telah dilakukan pemerintah," terangnya. (nt) foto:ry/parle

Kualitas Diutamakan Dalam Proses Penyusunan Prolegnas



Suasana rapat Baleg DPR

Dalam rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) perlu ada suatu kriteria yang sempurna, dimana kualitas harus didahulukan. Hal ini agar benturan-benturan dapat dihindari dalam menentukan program-program ke depan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR (Baleg) Rufinus Hotmaulana Hutahuruk kepada Parlemen usai Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg dengan Komisi Hukum Nasional RI (KHN), Komnas HAM, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) guna menja- ring masukan terkait Prolegnas 2015-2019.

“Dalam prolegnas perlu ada suatu prioritas agar jangan sampai kita dikejar tayang, tetapi tidak memperoleh target sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya kita lebih bagus pada kualitas,” ujar Rufinus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/12/2014).

Rufinus menyatakan, jika dirinya ditanya bagaimana sebenarnya Undang-Undang yang mendesak. Menurutnya sangat banyak, diantaranya UU KUHAP. Ia menilai UU KUHAP tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, karena UU KUHAP sendiri bermasalah.

Dijelaskan politisi dari Fraksi Hanura ini, bahwa dalam UU KUHAP ada diskresi yang diberikan kepada penyidik yang tidak ada SOPnya. Sehingga polisi bisa sewenang-wenang bahkan transaksional mungkin didalam membuat proses suatu berita acara pada yang disangkakan.

Apa yang terjadi kemudian, ditegaskan Rufinas, bahwa ini bisa berakibat fatal secara hukum. Karena sebenarnya penyidikan itu ditujukan untuk membuat terang masalah. “Itu inti dari penyelidikan, untuk membuat terang masalah,” tukasnya.

“Jadi tidak berpikir, bagaimana suatu proses ini bisa ke Pengadilan atau Kejaksaan, ini contoh. Begitu pula dalam KUHAP,” imbuh Rufinus.

Selanjutnya Rufinus menjelaskan, ada juga UU yang didorong sedemikian rupa tetapi sudah menimbulkan persoalan, seperti UU Advokat.

“Kita tahu UU Advokat ini didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu sampai timbul benturan-benturan bahkan fisik,” ungkapnya.

Ia mengaku, dalam forum RDPU Baleg tersebut, ada yang mendorong UU Advokat. Padahal UU ini sudah diuji di Mahkamah Konstitusi sampai tiga kali dan ditolak. (sc) foto: iwan armanias/parle/hr.

DPR Akan Undang Mendagri Terkait Pengangkatan Ahok

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan terkait permasalahan yang terjadi pada pimpinan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Komisi II DPR akan mengundang Menteri Dalam Negeri untuk meminta keterangan atas masalah pengangkatan Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur Prov. DKI Jakarta.

“Kami memahami bahwa masalah ini perlu segera ditindaklanjuti dan yakinlah bahwa kami dari Komisi II memang akan segera mengambil langkah-

langkah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan agar permasalahan ini dapat segera kita selesaikan,” kata Ahmad Riza Patria saat rapat audiensi Komisi II DPR dengan beberapa Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu, (19/11).

Ariza begitu sapaan akrab dari Ahmad Riza Patria juga berharap bahwa suasana DKI Jakarta yang juga sebagai Ibukota Negara dapat terus tenang, damai dan tentram dari permasalahan perbedaan tafsir ini dan jangan sampai

menimbulkan konflik berkepanjangan apalagi aksi anarkis.

“Kita harapkan bahwa saudara-saudara dari DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai wakil rakyat DKI Jakarta, ikut berusaha mencoba menyejukkan dan menentramkan ‘suhu’ yang cukup panas di DKI Jakarta ini,” jelas Ariza.

Kemudian tambah Ariza yang juga politisi partai Gerindra ini, Komisi II DPR menghargai atas langkah-langkah yang sudah diambil oleh pimpinan



Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria

dan anggota DPRD Prov. DKI Jakarta terkait keinginan meminta penjelasan atau fatwa kepada MA, serta ingin mengajukan ke PTUN.

Berkaitan dengan masalah peraturan perundang-undangan No.1 tahun 2014 atas rencana pengangkatan Wagub menjadi Gubernur, jelas Ariza, memang dalam UUD 1945 perlu Komisi II sampaikan pada pasal 18 ayat 4 berbunyi Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

“Kita kan mendengar nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, apa jawaban dari MK, terkait dengan pe-

ngangkatan Wakil Gubernur sebagai Gubernur apakah di perbolehkan dengan serta merta atau langsung menjadi gubernur atau harus dipilih secara demokratis sebagai mana tertuang dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945,” tegasnya.

Sebelumnya, diantara rombongan DPRD DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dihadapan rapat audiensi menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke Komisi II DPR dalam rangka melakukan konsultasi dan meminta pendapat terkait permasalahan pelantikan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. (nt)/foto:rizka/parle/hr.

Komisi I Bahas Ratifikasi Pertahanan RI-Pakistan dan Timor Leste

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan dan Pemerintah Republik Demokrat Timor Leste tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dibicarakan Komisi I DPR dengan pakar pertahanan Kusnanto Anggoro, dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung, di ruang Rapat komisi I DPR Senayan Rabu (19/11) siang.

Menurut Asril Tanjung, Presiden telah menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah membahas kedua RUU tersebut bersama-sama dengan DPR.

Dalam kesempatan itu, Kusnanto Anggoro mengatakan, bahwa ratifikasi merupakan proses politik yang pada dasarnya melambangkan persetujuan DPR pada kebijakan eksekutif dalam menjalin kerjasama Internasional, dan lebih dari itu mengikat diri dalam bentuk perjanjian Internasional.

Secara politik, lanjut Kusnanto ratifikasi akan memberi legitimasi politik lebih besar bagi perjanjian Internasional. Pertanyaannya adalah seberapa besar urgensi kerjasama itu perlu dikukuhkan dalam sebuah persetujuan,



Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung

dan apakah ratifikasi atas persetujuan itu perlu dikukuhkan dalam bentuk Undang-Undang atau cukup Keputusan Presiden saja.

Naskah awal persetujuan Indonesia dengan Pakistan dan Timor-Leste menggariskan tentang beberapa hal, misalnya dialog tentang masalah-masalah strategis, pertukaran informasi pertahanan, dan kerjasama militer.

Pasal-pasal akhir dalam kedua persetujuan itu juga membuka ruang kerjasama yang lebih luas. Rumusan umum seperti itu membuka ruang lebih besar bagi kemungkinan untuk dikembangkan di kelak kemudian hari

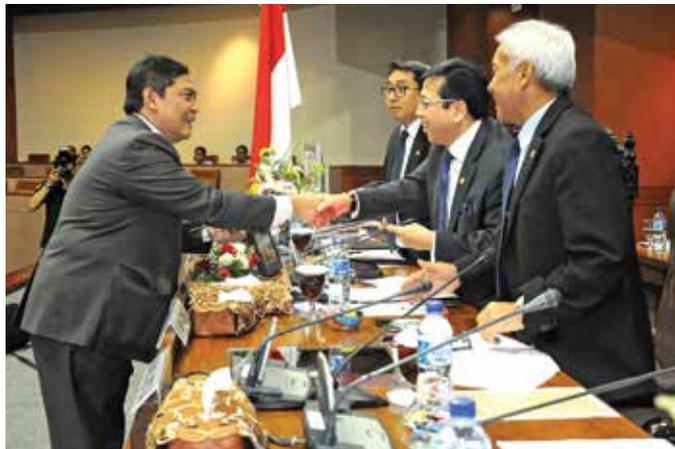
dengan melihat pada perkembangan keadaan, urgensi dan relevansinya bagi Indonesia.

Kusnanto mengemukakan, bahwa masih banyak alasan dapat disebut tentang pentingnya Pakistan dan Timor-Leste. Pasang surut hubungan Islamabad dengan Washington, New Delhi dan Beijing adalah salah satu dari alasan tentang mengapa Pakistan bisa memainkan peranan kunci dalam dinamika politik Asia Selatan. Meningkatnya hubungan Timor-Leste dengan China, di tengah menyusutnya hubungan antara Dilli dan Canberra, tentu merupakan salah satu dinamika yang langsung atau tidak, perlu memperoleh perhatian dari Indonesia.

Pada akhirnya ratifikasi persetujuan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Pakistan dan Timor-Leste akan memberi bobot legal, politik dan diplomasi yang lebih baik dalam hubungan Indonesia dengan kedua negara dimaksud. Namun kecil kemungkinan kalau ratifikasi itu akan membawa kosekuensi pada misalnya perluasan kerjasama luar negeri. Kerjasama pertahanan Indonesia dengan Pakistan sudah dimulai sejak lama, begitu pula halnya kerjasama dengan Timor-Leste. (Spy)/foto:andri/parle/hr.



Paripurna Sahkan Anggota Fraksi di Komisi dan AKD



Jubir F-PDI Perjuangan Utut Adianto menyerahkan daftar nama anggota Baleg dan BURT

Sebagai tindak lanjut kesepakatan damai dua kubu DPR, Selasa (18/11/14) DPR menggelar rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto dengan agenda pengesahan nama-nama anggota fraksi pada komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan. Lima fraksi yang tergabung dalam KMP telah disahkan beberapa waktu lalu, sementara rapat kali ini pengesahan keanggotaan dari F-PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

Dalam acara ini menyerahkan secara lengkap anggotanya untuk duduk di Komisi dan AKD dari Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem, sementara, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura dan Fraksi PKB hanya menyerahkan nama anggotanya untuk ditempatkan di sebagian AKD.

Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB hanya menyerahkan susunan nama anggotanya yang ditempatkan di Badan

Legislasi (Baleg) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Sedangkan Fraksi Partai Hanura hanya menyerahkan susunan anggota Baleg.

Meski demikian, Ketua DPR Setya Novanto yang didampingi Wakil Ketua Fadli Zon, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan tetap mengesahkan nama-nama tersebut sebagai anggota Komisi dan AKD. Walaupun belum diserahkan tetapi telah dianggap sah dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan rapat paripurna ini. Ketua DPR memberi waktu kepada fraksi-fraksi yang belum menyerahkan nama anggotanya di komisi dan AKD pada pekan ini.

Anggota DPR RI dari Demokrat, Benny K Harman meminta kepada pimpinan DPR agar menetapkan batas waktu untuk penyerahan nama-nama anggota yang akan duduk di AKD.

Susunan keanggotaan Fraksi PDIP pada AKD yang dibacakan oleh Utut Adianto menyebutkan bahwa fraksinya hanya menyerahkan nama-nama anggotanya untuk duduk di Baleg dan BURT. Nama-nama untuk keanggotaan Komisi dan AKD lain menyusul.

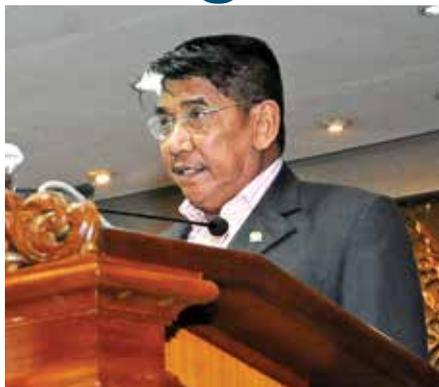
Hal yang sama disampaikan Fraksi PKB, sementara Fraksi Partai Hanura hanya menyerahkan nama-nama anggotanya untuk duduk di Baleg dan BURT.

Namun anggota DPR dari Nasdem, Taufiqul Hadi menyatakan, fraksinya tidak setengah-setengah untuk menyerahkan nama-nama anggotanya. "Kami tetap konsisten dengan keputusan KMP-KIH kemarin. Kami akan hadir rapat-rapat Komisi dan AKD lainnya karena kami yakin, kesepakatan kemarin adalah ketulusan," jelas Taufiqul Hadi. (sf,mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Paripurna DPR Tetapkan Peraturan Tenaga Ahli DPR

Rapat Paripurna DPR RI dipimpin Ketua DPR Setya Novanto, Selasa (18/11/2014) menetapkan Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI

"Sidang Dewan yang terhormat setelah kita mendengarkan dengan seksama Laporan Pimpinan Baleg DPR RI, maka kami selaku pimpinan Rapat Paripurna akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah



Ketua Baleg DPR Sarehwiyono

Laporan Baleg DPR RI mengenai Rancangan yang sudah kita lihat bersama dapat kita setuju," kata Novanto di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR, Jakarta.

Seluruh anggota Dewan yang hadir serentak mengucapkan persetujuannya, "Setuju." Ketua Rapat Paripurna pun langsung menyetujui palunya sebagai tanda setuju.

Selanjutnya Novanto menutup

Rapat Paripurna DPR dengan mengajak semua anggota untuk segera bekerja keras sebagai jawaban atas harapan rakyat yang telah mendukung Dewan.

“Dengan demikian, selaku Ketua DPR saya mengajak semua anggota untuk segera bekerja keras dalam naungan Lembaga Perwakilan Rakyat yang terhormat ini. Kita harus segera menjawab harapan rakyat dengan kerja nyata dan sebaik-baiknya dan tidak kenal lelah,” tegasnya.

Sebelumnya dalam Rapat yang juga dihadiri para Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto, Ketua Baleg DPR Sareh-wiyono dalam laporannya menyatakan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi DPR RI ini sudah dipersiapkan sejak Baleg terbentuk dengan dukungan Deputi Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Komitmen Baleg dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan serta peningkatan profesionalitas. Sehingga Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dapat memberikan dukungan secara optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR baik di Alat Kelengkapan Dewan, Fraksi maupun Anggota Dewan,” terang Sareh.

Sareh menerangkan, pembentukan Peraturan DPR RI ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

“Selain berpedoman pada kedua peraturan tersebut, dalam peraturan DPR RI ini terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan rincian teknis pelaksanaan rekrutmen Tenaga Ahli

dan Staf Administrasi Anggota Dewan,” ujarnya.

Sareh juga menginformasikan, bahwa berdasarkan pendapat akhir mini Fraksi-fraksi pada akhir Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Pleno Baleg tanggal 17 November 2014, Pleno Baleg dapat menerima dan menyetujui hasil pembahasan Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI untuk diajukan/dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Pada Rapat Paripurna Dewan yang dihadiri 338 orang anggota itu, sebelum Sareh menyampaikan laporannya, beberapa anggota Dewan menyampaikan interupsi. Mereka meminta penetapan Peraturan ini ditunda, pasalnya anggota Dewan (dari KIH) baru bergabung kedalam Baleg dan mereka merasa tidak turut serta dalam pembahasan peraturan tersebut. (sc) foto:iwan armanias/parle/iw.

Parlemen Spanyol Akan Berkunjung ke DPR



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima Dubes Spanyol

Parlemen Spanyol rencananya akan berkunjung ke DPR pada tanggal 3 Desember 2014. Delegasi parlemen Spanyol tersebut akan banyak bertukar pikiran soal situasi terakhir di kedua

negara, sekaligus menguatkan kembali hubungan bilateral kedua negara.

Demikian dijelaskan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto usai menerima

kunjungan kehormatan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Francisco Jose Viqueira Niel di ruang kerjanya, Kamis (20/11). “Tanggal 3 Desember akan ada delegasi parlemen dari Spanyol yang akan berkunjung ke sini,” kata Agus.

Sebagai tuan rumah, kata Agus, DPR harus menerimanya dengan memberi pelayanan yang baik. Bahkan, sang Dubes juga menawarkan Pimpinan DPR untuk berkunjung ke Spanyol dan akan difasilitasi dengan baik.

“Seluruh tamu harus kami terima dengan baik. Mereka ke sini hanya ingin bertukar pikiran dan hanya ingin melihat yang ada di sini. Tugas kami tentu harus melayani. Kalau kami ke luar negeri pun sering merepotkan seperti ini. Tadi beliau juga ingin memfasilitasi bila berkunjung ke Spanyol. Ini tentu hal yang biasa. Kita saling bertukar pikiran. Kita saling *transfer of knowledge*. Itu sesuatu yang wajar dan baik,” ujar Agus. (mh) foto:ry/parle/hr.



Setjen DPR Adakan *Knowledge Sharing* Dengan Mahasiswa Jayabaya



Para mahasiswa Universitas Jayabaya Jakarta mendapat penjelasan tentang proses pembahasan RAPBN

Sekitar 100 mahasiswa dari Jurusan Administrasi Negara, Universitas Jayabaya, Jakarta, memadati ruang Badan Anggaran, Gedung Nusantara I, Selasa (18/11/14). Kedatangan mereka bukan hendak berdemonstrasi, tapi ingin menimba ilmu dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR RI.

Hadir pada acara ini, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setyanta Nugraha, membawakan materi mengenai Mekanisme Pembahasan APBN dan Tantangan APBN. Totok, panggilan akrab Setyanta menekankan besaran asumsi makro APBN, hingga profil APBN 2015.

“Ini sesuai dengan jurusan dan mata kuliah mereka, yaitu Administrasi Negara. Dengan mempelajari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, administrasi negara atau administrasi pemerintah,” kata Totok, saat ditemui usai acara.

Totok menambahkan, pihak jurusan meminta *knowledge sharing* dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, mengenai pelaksanaan fungsi anggaran, yang diantaranya

berkenaan dengan mekanisme penyusunan APBN, proses di dalam pembahasan APBN, sampai pelaksanaan APBN oleh pemerintah.

“Harapannya, ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan para mahasiswa. Untuk Universitas Jayabaya bahkan pertemuan ini sudah ke empat kalinya di tahun ini. Belum lagi dari universitas lain,” imbuh Totok.

Antusiasme mahasiswa terlihat saat sesi tanya jawab. Bahkan hingga dibuat tiga sesi tanya jawab, dimana satu sesinya terdapat 3-4 penanya. Totok mengapresiasi mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

“Di awal-awal memang masih terlihat biasa, masih malu-malu. Mereka antusias dalam bertanya. Mereka juga mengikuti perkembangan. Apa yang mereka tanyakan, merupakan isu-isu yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti masalah subsidi BBM, utang luar negeri, itu menjadi isu menarik,” tambahnya.

Kepala Program Studi Administrasi Negara Universitas Jayabaya, Achmad Hamsidi menyatakan, bahwa jurusan yang dipimpinnya memang memiliki program kunjungan ilmiah ke instansi yang berkaitan dengan administrasi negara. Salah satunya Setjen DPR ini.

“Jadi, mahasiswa bukan hanya belajar di lingkungan kampus saja, nanti bisa jenuh. Sehingga kita bawa keluar kampus, dengan harapan ilmu yang didapatkan juga bertambah. Harapan kami, ilmu yang disampaikan tadi dapat berguna bagi mahasiswa. Apalagi di umur mereka saat ini, mereka haus akan ilmu,” jelas Hamsidi.

Hamsidi menambahkan, selain ke Setjen DPR, kunjungan berbagai angkatan jurusan Administrasi Negara ini juga dilakukan ke Dirjen Pajak, Bea Cukai, Pemerintah Daerah, dan lain-lain. Acara diakhiri dengan bertukar cenderamata dan foto bersama. (sf)/foto:naefurodji/parle/hr.

Pimpinan SKK Migas Baru Harus Tegas

Anggota DPR Ramson Siagian dari Gerindra mengatakan, Pimpinan SKK Migas yang baru harus memiliki ketegasan, dan mampu memberikan solusi atas penurunan *lifting* minyak 1.2 juta barel menjadi 800 ribu barel perhari.

“Selain itu juga harus menjauhkan dari kepentingan pribadi dan berlaku obyektif,” ujarnya saat diwawancarai soal penunjukan Kepala SKK Migas



Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian

yang baru Amien Sunaryadi, di Gedung DPR, Kamis, (19/11).

Menurutnya, Kepala SKK Migas juga harus memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni, ketegasan serta mampu mengefektifkan lembaga itu dalam meningkatkan *lifting* minyak.

Presiden Joko Widodo menunjuk Amin Sunaryadi, mantan komisioner

Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007, sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Amin akan menggantikan Johannes Widjonarko yang bertindak

sebagai pelaksana tugas Kepala SKK Migas.

Seperti di ketahui, keputusan Presiden nomor 189/M/2014 tanggal 18 November 2014, berisi pemberhentian

permanen Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas, terhitung mulai 22 April 2014. Selain itu, Keppres itu juga memberhentikan Johannes Widjonarko sebagai pelaksana tugas Kepala SKK Migas. (si) foto:dok/parle/hr.

Revisi UU MD3 Sebagai Penguatan Sistem Pemerintahan



Suasana Rapat Baleg dengan Menkumham

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang akan segera dilakukan Badan Legislasi DPR (Baleg) dalam waktu dekat ini, semangatnya adalah agar DPR bisa bekerja secara maksimal, akuntabel, dan *representative* dari sebuah demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Baleg Anna Muawanah disela-sela Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Dijelaskan Anna, agar DPR dapat bekerja secara maksimal, akuntabel dan *representative* maka diperlukan perubahan beberapa pasal pada UU MD3, dimana bagian turunannya nanti ada pada Tata Tertib DPR RI.

Pasal-pasal yang akan direvisi antara lain Pasal 74, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152.

Revisi ini juga, menurut politisi Fraksi PKB ini, memberikan penguatan pada sistem pemerintahan di Indonesia yaitu *presidential*. Namun tidak mengurangi peran serta DPR sebagai fungsi Pengawasan, *check and balances* itu. Termasuk juga bagaimana DPR sebagai lembaga legislative yang memiliki fungsi kontak pada lembaga eksekutif.

Anna optimis revisi UU MD3 ini bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat sebelum Reses Masa Persidangan I ini, karena pembahasan di Baleg ini akan dimaksimalkan.

“Ketika rapat kerja dengan Menkumham tadi dan juga mungkin sudah ada kebijakan dari masing-masing fraksi, rasa-rasanya ini bisa disetujui. Dan kemudian kita punya target barangkali sebelum masa sidang selesai sudah akan kita selesaikan,” imbuh Anna.

Anna menyatakan setelah revisi UU MD3 ini selesai dan Tata Tertib DPR RI dirapikan, DPR bisa bekerja secara maksimal dan di saat reses nanti DPR bisa melakukan kunjungan-kunjungan yang merupakan bagian dari tugas DPR untuk pengawasan di lapangan.

Ia juga menjelaskan bahwa revisi UU MD3 ini juga mengadopsi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Pasal 23 ayat 2. Dimana dalam keadaan tertentu maka DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. (sc) foto: naefuroji/parle/hr

Tata Kelola Migas Harus Ditata Ulang

Fraksi Nasdem DPR dukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Tak ada solusi lain di balik kenaikan ini, kecuali harus menata ulang tata kelola migas dan menutup mata rantai mafia migas.

Demikian penegasan Anggota F-Nasdem M. Kurtubi sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/11). “Putusan

menaikkan harga adalah wewenang pemerintah. Partai Nasdem mendukung kebijakan pemerintah. Solusi lain secara berbarengan termasuk solusi menata ulang tata kelola migas, menutup mata rantai mafia migas harus dilakukan,” kata Kurtubi.

Soal momen kenaikan di saat harga minyak dunia turun, menurut Ang-

gota Komisi VII DPR ini, tetap tepat dilakukan. Walau pun negara jiran seperti Malaysia malah menurunkan harganya. Dijelaskan Kurtubi, di Malaysia produksi minyaknya jauh di atas kebutuhan dalam negerinya. Produksi minyak Malaysia 700-800 barel per hari. Sementara konsumsinya 400-500 barel per hari.



Anggota DPR Kurtubi dari Fraksi Partai Nasdem

Berbeda dengan Indonesia yang produksinya 400.000 barel per hari, dengan konsumsi 1,6 juta barel per hari. “Berarti kemampuan bangsa ini menghasilkan minyak mentah yang merupakan bahan baku BBM hanya seperempat atau 25% dari kebutuhan dalam negeri,” ungkapnya. Kilang minyak milik Pertamina yang beroperasi 24 jam pun hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri.

“Jadi, saya melihat bahwa posisi

Indonesia dalam soal BBM dan migas sangat menyedihkan. Ini perlu dikasih tahu kepada semua rakyat bahwa posisi migas kita berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana produksi minyak dan BBM kita relatif tinggi. Sekarang produksinya begitu rendah, sehingga kita harus mengimpor dalam jumlah yang amat besar. Nilai impor 5 miliar USD per tahun menyebabkan defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran dalam APBN. Ini karena harga BBM yang masih disubsidi,” ujarnya. (mh)/foto:andri/parle/iw.

Komunikasi Interpersonal Cairkan Dua Kubu DPR

Komunikasi yang intensif dilakukan oleh dua kubu yang sempat terpecah di DPR, melahirkan penyatuan kembali semua unsur fraksi di DPR. Menyatu-nya DPR merupakan keniscayaan yang pasti terjadi, cepat atau lambat. Keberhasilan itu terletak pada komunikasi interpersonal yang baik.

Anggota F-PDI Perjuangan Jalaluddin Rakhmat mengemukakan hal tersebut sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/11). Menurutnya, sumber masalah yang memecah dua kubu di DPR adalah UU MD3 yang oleh satu kubu dinilai tak adil. Kini, dengan ditandatanganinya kesepakatan dua kubu, semua mencair dan menjadi DPR RI, bukan lagi DPR versi dua kubu. UU MD3 pun segera dirubah, terutama pasal-pasal yang mengatur alat kelengkapan dewan (AKD).

“Saya kira ini sebagai keniscayaan. Masa selama 5 tahun kita semua tidak bekerja, karena ada dua kelompok di DPR. Jadi, memang, tidak ada pilihan, kalau mereka mau menjalankan tugas

di DPR, ya harus diupayakan adanya islah,” kata Jalal yang juga Anggota Baleg DPR. Sebagai orang baru di DPR, Kang Jalal-begitu ia akrab disapa-mengaku sempat bingung dengan perpecahan yang terjadi. Ternyata, setelah dipelajari, UU MD3 menjadi sumber masalahnya.

Menurut mantan Kepala Sekolah SMA Muthahari Bandung itu, UU MD3 yang dirumuskan mestinya selain memberi kepastian hukum, juga harus memenuhi rasa keadilan. Bagaimana mungkin partai pemenang pemilu tak mendapat satu pun kursi pimpinan AKD di DPR. Dan kesepakatan untuk merubah pasal-pasal krusial dalam UU MD3 itu merupakan pemenuhan dari dua hal, kepastian hukum dan rasa keadilan.

Menurut pakar komunikasi ini, keliwaian melakukan komunikasi interpersonal oleh tokoh-tokoh di dua kubu, menjadi kunci untuk menyatukan dua kekuatan di parlemen. “Ini membuktikan bahwa keputusan-kepu-



Anggota F-PDI Perjuangan Jalaludin Rakhmat

tusan penting parlemen tidak selalu dirumuskan dalam Sidang Paripurna. Tapi, keputusan penting ditentukan dalam negosiasi interpersonal di luar Gedung DPR. Dan itulah yang saya lihat intensif dilakukan. Mungkin tempatnya juga tidak di ruang-ruang DPR, tapi di restoran dan rumah pribadi. Itu yang paling efektif.” (mh)/foto:andri/parle/hr.

Momen Kenaikan BBM Tidak Tepat

Momen kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak tepat untuk saat ini. Pemerintah belum menjelaskan secara rinci kemana realokasi anggaran subsidi tersebut mengalir. Inflikasi yang mungkin ditimbulkan adalah naiknya angka orang miskin di Indonesia.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) mengemukakan hal tersebut sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/11). Menurutnya, ada rilis yang menyatakan saat ini ada 29 juta rakyat miskin di Indonesia. Dengan kenaikan

ini, katanya, mungkin ada tambahan 50 juta lagi rakyat miskin di Tanah Air.

“Kalau kita ketahui hari ini kita merilis 29 juta rakyat miskin, tetapi dengan Rp2000 kenaikan BBM, saya yakin akan menyusul 50 juta tambahan lainnya. Ini



Ketua Komisi VI DPR-RI Achmad Hafisz Tohir

yang harus kita hadapi. Bukan berarti kita tidak setuju dengan kenaikan BBM. Kalau saya melihat, naiknya BBM saat ini momennya kurang tepat,” nilai Hafisz.

Ditambahkan Hafisz, industri otomotif sedikit banyak akan terganggu dengan kenaikan ini. Produksi barang dan jasa yang mengonsumsi BBM dengan sendirinya akan mendorong harga-harga, termasuk produk industri. Daya beli masyarakat semakin terbatas, karena penghasilannya tidak mengalami kenaikan yang signifikan. “Ini berbahaya bagi ekonomi kita,” ujarnya singkat.

Dan yang paling terpuak dengan kenaikan ini, sambung Hafisz, adalah

kelompok UKM. Pemerintah dihimbau agar memiliki instrumen untuk mempertahankan UKM agar tetap berproduksi di tengah himpitan ekonomi. “UKM paling menderita dengan kenaikan BBM. Pemerintah harus memiliki instrumen bagaimana UKM bisa bertahan di saat ekonomi kita mengalami tekanan.”

Ditambahkan Hafisz, alokasi subsidi yang Rp100 triliun harus dibicarakan di DPR, karena ini bagian dari kewenangan Banggar DPR. “Tidak bisa pemerintah semena-mena mengatur Rp100 triliun itu ke mana dan di mana. Itu harus diputus di DPR,” tandasnya mengakhiri wawancara. (mh)/foto:andri/parle/iw.

DPR Minta BPH Migas Sampaikan Data Penyelewengan BBM Subsidi

Komisi VII DPR akan Meminta BPH Migas untuk menyampaikan data penyalahgunaan BBM bersubsidi termasuk mafia migas yang oleh pemerintah disebut memiliki kekayaan 1.4 T kepada Komisi VII DPR RI paling lambat Senin 24 November 2014.

“Kesimpulan ini dalam rangka mencari solusi terkait pemerantasan mafia migas misalnya ada pejabat eselon empat bisa memiliki kekayaan berlimpah karena main migas ini” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, saat RDP dengan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, di Gedung Nusantara I, Kamis, (19/11).

Menurutnya, kita harus menyelamatkan masyarakat kecil dari mafia migas karena dampaknya sangat merugikan Indonesia. “Tidak ada istilah memerangkan mafia migas sulit dahulu kita berpikir itu susah karena ada bekingnya mari kita selamatkan uang negara dari mafia migas,” tegasnya,

Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR juga mendesak BPH Migas untuk melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi tentang tumpang tindih kelembagaan dan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menghambat kinerja BPH Migas.



Pimpinan Komisi VII DPR Mulyadi (Wk.Ketua) dan Kardaya Warnika (Ketua)

“Komisi VII DPR juga mendesak BPH migas untuk melakukan upaya maksimal agar realisasi BBM subsidi tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan,” ujar Mulyadi saat membacakan butir kesimpulan RDP dengan BPH Migas. (si) foto : naefurodjie/parle/hr.

Komisi V DPR Panggil Menhub Terkait Tarif Angkutan Umum

Komisi V DPR akan meminta penjelasan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait penetapan kenaikan tarif angkutan umum yang hanya 10 persen. Pasalnya, kenaikan tersebut memberatkan para pengusaha angkutan darat.

“Sebelumnya ada pernyataan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang hanya memperbolehkan angkutan umum naik 10 persen, padahal Organda memberikan masukan kenaikan tarif minimum harusnya sebesar 29 persen, karena itu kita akan meminta keterangan Menteri Perhubungan,”



Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dan Ketua Organda Eka Sari Lorena Soerbakti

ujar Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, sesuai RDPU dengan Ketua Organda Eka Sari Lorena Soerbakti, di Gedung Nusantara, Rabu, (19/11).

Menurutnya, angkutan umum darat harus diberikan insentif untuk mengurangi dampak kenaikan BBM bersubsidi

dan Solar. “Komisi V DPR akan meminta pemerintah menyusun kebijakan khusus bagi angkutan umum,” tegasnya.

Ketua Organda Eka Sari Lorena Soerbakti mengatakan, saat ini angkutan umum termasuk bis dan truk hanya menikmati tujuh persen BBM subsidi, jika dibandingkan kendaraan pribadi mencapai 53 persen. “Kenaikan solar bahkan lebih besar dibandingkan dengan bahan bakar premium, solar mencapai 36 persen, sementara premium itu 25 persen,” terangnya.

Eka sari mempertanyakan penyesuaian tarif hanya boleh maksimum sebesar 10 persen. Pasalnya sampai saat ini belum ada penjelasan darimana angka 10 persen didapatkan. “Kami berharap pemerintah mengedepankan angkutan umum jalan raya karena memang ini bisa menekan kemacetan, maupun logistik, jadi angka 10 persen itu tidak realistis,” tegasnya.

Dia menambahkan, perlu ada kompensasi konkret bagi transportasi darat. “Kompensasinya bisa saja seperti keringanan kredit bunga bank, kita beli bis dan truk bisa kena 15 persen sementara angkutan pribadi hanya 5 persen,”ujarnya. (si) foto : rizka/parle/hr.

Kenaikan BBM Subsidi Tergesa-gesa



Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan, kenaikan BBM Subsidi sangat tergesa-gesa dan tanpa perhitungan yang matang. “Kenaikan BBM dari sisi waktu tidak pas, karena harga minyak dunia turun 30 persen. ini kenapa Kok BBM dinaikkan, dalam sejarah tidak pernah terjadi kenaikan BBM Subsidi ketika harga minyak turun,” ujar Kardaya saat diwawancarai oleh Parleментарia, di Gedung DPR, Kamis, (19/11).

Menurutnya, perhitungan subsidi BBM seharusnya berdasarkan kepada

dua indikator yaitu harga minyak mentah dan nilai tukar. “Ini belum pantas naik, bahkan kompensasinya saja beda-beda pembiayaannya ada yang bilang dari CSR, kemudian menteri lain bilang dari APBN,” katanya.

Dia menambahkan, Komisi VII DPR akan meminta penjelasan kepada pemerintah meskipun ini merupakan wewenang. “Kita akan meminta penjelasan karena kalau memang mau merubah subsidi energi itu seharusnya berdasarkan harga minyak dan nilai tukar,” jelasnya. (si) foto : dok/parle/hr.

Korpri DPR Gelar Donor Darah

Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar aksi sosial donor darah di Gedung Nusantara. Para karyawan di lingkungan MPR/DPR berdatangan dengan sangat antusias untuk mendonorkan darahnya kembali.

Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, Selasa (18/11). Sejak dibuka pendaftaran pada pukul 08:00 WIB, para karyawan sudah berdatangan untuk mendonorkan darahnya. Tradisi ini sangat baik untuk menumbuhkan kepedulian sosial kepada sesama. Kebutuhan darah untuk wilayah Jakarta saja terus meningkat dari ta-

hun ke tahun.

Para pejabat di lingkungan DPR pun tak ketinggalan mendonorkan darahnya. Selain Sekjen DPR, ada pula Wakil Sekjen DPR Achmad Juned, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko, dan Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setyanta Nugraha. Petugas Pamdal, para tamu, dan juga para pegawai MPR RI ikut bebondong-bondong mendonorkan darah.

Menurut Sekjen DPR Winantuningtyastiti, para pegawai



Suasana donor darah di lingkungan Setjen DPR/MPR

dan karyawan di lingkungan DPR sudah menyadari kebutuhan donor darah bagi mereka yang membutuhkan. “Setiap ada even tertentu kita selalu berusaha untuk menyelenggarakan, setidaknya 4 kali dalam satu tahun. Ini juga bentuk fasilitas kepada pendonor yang sudah secara rutin memberikan donor darahnya,” ujar Win.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko, mengungkapkan, ia sudah 28 kali mendonorkan darahnya. Walau dulu sesungguhnya ia sangat takut pada jarum, tapi akhirnya mau memberanikan diri untuk mau melakukan aksi sosial lewat donor darah. “Ini manfaatnya bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kita sendiri. Darah yang kita donorkan akan mengalami pergantian (regenerasi). Itu manfaat pribadi dan sosial yang kita dapatkan dari donor darah ini,” aku Djaka. (mh) foto:ry/parle/hr.

Harga BBM Naik, F-PDIP Siap Bahas APBN-P 2015

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM diperkirakan dapat menghemat anggaran untuk subsidi sekitar Rp92 triliun. Sejumlah penyesuaian perlu dilakukan pada pembahasan APBN-P 2015 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) untuk mengatur pengalihan anggaran ini.

“Dengan kenaikan BBM ini ada uang negara yang dihemat Rp92 triliun. Kita akan mendorong anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur dan menaikkan daya beli, sektor produksi, padat karya, dll. Itu perjuangan kita di DPR dan akan kita bicarakan dalam APBN-P,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/14).

Ia menyebut kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai pilihan sulit yang dapat dipahami. Baginya



Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto

yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengawal pemerintah memberikan perhatian kepada rakyat yang paling terpuak dengan kenaikan harga BBM ini.

Dalam catatannya saat ini terdapat 15,5 juta kepala keluarga yang masuk kategori miskin dan rentan miskin. Salah satu bentuk empati kepada kelompok masyarakat ini adalah dengan memberi dana bantuan melalui Kartu

Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (K2S).

“Kalau ada yang sakit bisa gunakan Kartu Indonesia Sehat, kalau perlu biaya sekolah ada KIP dan untuk mendukung daya beli ada kartu K2S. Kita kawal betul agar rakyat terdampak bisa dibantu, semua dana diberikan pake e-transfer agar tidak dikuntit sama yang lain,” ujar dia.

Bambang juga menjawab pertanyaan wartawan tentang perubahan sikap Fraksi PDIP yang sebelumnya lantang menolak opsi kenaikan BBM. “Dulu yang kita tolak adalah argumentasi kenaikan yang bisa kita patahkan melalui argumentasi buku putih. Ada 4 argumen pemerintah waktu itu dan kita patahkan dengan buku putih itu,” demikian Bambang. (iky) foto:dok/parle/hr.

Jambi Seharusnya Bisa Menjadi Daerah Alternatif Wisata

Kabupaten Kerinci, yang terletak di Provinsi Jambi, dikatakan Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra, memiliki potensi pariwisata yang menakutkan. Seharusnya, daerah ini bisa menjadi alternatif wisata bagi para wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara ketika berkunjung ke Jambi.

an. Ada Gunung Kerincinya, Danau Kerinci, Danau Belibis, dan danau lainnya. Alam Kerinci sungguh sangat luar biasa, sejuk dan indah. Ini merupakan wisata alam, yang seharusnya menjadi pariwisata strategis Indonesia,” jelas Sutan, usai RDPU dengan pakar pariwisata, di Gedung Nusantara I, Senin (17/11/14).

“Alam di Kabupaten Kerinci itu mempunyai suatu kelebihan

Namun, dengan berbagai potensi ini, tambah Sutan, be-



Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra

lum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Padahal, jika potensi pariwisata ini dapat dikembangkan, dapat

mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, maupun masyarakat setempat.

“Saya melihat ini belum menjadi target dari pemerintah. Padahal kita ketahui, pariwisata ini akan menjadi sesuatu manfaat yang besar, baik untuk kesejahteraan masyarakat, juga akan menambah penghasilan asli daerah untuk pemerintah daerah,” imbuh Sutan.

Politisi Gerindra ini menambahkan, saat ini belum tercipta koordinasi yang harmonis antar pemangku kepentingan di pemerintah. Pasalnya, untuk mengembangkan pariwisata, perlu dukungan dari berbagai pihak.

Ini adalah suatu kesempatan bagi

Pemda di dalam mengembangkan kawasan strategi pariwisata. Untuk pariwisata di Kerinci mudah-mudahan dapat kita wujudkan, dan menjadi kebanggaan Indonesia.

“Saya melihat, masih kurangnya koordinasi bidang pariwisata di Jambi. Perlu adanya koordinasi di bidang infrastruktur, aspek lingkungan, dan lainnya. Saya berharap, Pemda dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait,” harap Sutan.

Sehingga, dengan terlibatnya seluruh pemangku kepentingan, dapat mewujudkan pariwisata Kabupaten Kerinci menjadi primadona bagi bangsa Indonesia, harap Politisi asal Jambi ini. (sf) foto: eka hindra/parle/hr.

Pemerintah Belum Siap Rapat Kerja Dengan DPR

Untuk kesekian kalinya, Komisi XI DPR membatalkan rapat kerja dengan mitra kerjanya. Dijadwalkan, Senin (17/11/14), Komisi XI akan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan, namun ditunda. Bahkan, sebelumnya Komisi X juga pernah membatalkan rapat dengan Kementerian Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, dalam konferensi pers di lobby Komisi XI, Senin (17/11/14) menyatakan, OJK meminta jadwal rapat diundur karena belum siap menyajikan materi yang diminta Komisi XI. Rencananya, rapat akan membahas lalu lintas devisa dan kondisi perbankan yang cukup memperhatikan.

“Saya sudah bicara via telpon dengan Muliawan D Hadad (Ketua Dewan Komisiner OJK), beliau minta diundur jadi Senin (24/11/14) besok. Alasannya, banyak poin masalah yang kami minta jelaskan, dan hal itu buat mereka minta diundur,” jelas Fadel.

Sebelumnya, Komisi XI menjadwalkan rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pada Jumat (14/11/14), namun ditunda dengan alasan jajaran BI belum siap secara internal. Padahal, Komisi XI hanya meminta BI menjelaskan perihal data cadangan perbankan, penjelasan tentang perubahan-perubahan Undang-Undang (UU) Perbankan yang ditengarai terlalu liberal.

Sementara, rapat kerja dengan Kementerian Keuangan juga terpaksa ditunda karena Menkeu dan jajaran belum menyiapkan bahan rapat. Padahal, Komisi XI telah menjadwalkan rapat pada Rabu (12/11/14).



Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad didampingi Wakil Gus Irawan Pasaribu, anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun dan Haerul Saleh

“Mereka sedang menyiapkan hal yang menjadi pertanyaan, seperti Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, mulai dari kesiapan hingga cantolan anggarannya jangan keluar tanpa dasar yang jelas. Kita pertanyakan juga masalah BBM, kita minta kejelasan dana bantalannya agar orang miskin tidak semakin miskin,” tambah Fadel.

Ketika ditanya apakah rapat kerja sengaja ditunda, Fadel menepis hal itu. Ia menyatakan, pihaknya memaklumi ketidakdaksiapan pemerintah yang baru dilantik dan masih membenahi urusan internal.

Terkait dengan perubahan UU Perbankan yang sedianya akan dibahas bersama OJK, Fadel menyatakan ada sejumlah poin dalam UU Perbankan yang perlu diubah. Termasuk tentang Bank Indonesia yang harus dirombak. Karena, tambah Fadel, ada sejumlah poin yang dinilai merugikan kepentingan bangsa, dan malah menguntungkan kepentingan asing.

“UU Perbankan kita mau rombak. Kita nggak mau perbankan bebas, asing semuanya begitu. Kita mau perketat. Kemudian, diberikan kesempatan orang-orang pribumi untuk pinjam,” tutup Fadel.

Dalam konferensi pers ini, Fadel didampingi Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan, Wakil Ketua Komisi XI Gus Irawan Pasaribu, Anggota Komisi XI Mukhammad Misbakhun dan Haerul Saleh. (sf) foto: andry/parle/hr.

Program Kepemudaan Belum Sentuh Pemuda Daerah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Nuroji mengatakan dukungan pemerintah terhadap pemuda diibaratkan hujan gerimis, yang disiram anggaran sebentar kemudian menghilang. Hal tersebut diungkapkannya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Pakar di bidang Pendidikan Tinggi dan Kepemudaan, Abdul Hakam Naja dan Gamal Albinsaid- pemuda yang berprofesi sebagai dokter yang mendapat berbagai penghargaan baik dari mancanegara maupun dari dalam negeri berkat idenya membuat asuransi kesehatan dengan sampah.

“Globalisasi membawa dampak yang begitu kompleks termasuk dalam bidang kepemudaan yang jumlahnya di Indonesia sebesar 30 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Oleh karenanya jumlah yang tidak sedikit ini perlu mendapat dukungan program dan SDM (sumber daya manusia) yang kuat untuk bisa menghadapi persaingan global,” ungkap Politisi dari



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Nuroji

Fraksi Partai Gerinda ini.

Sayangnya, dilanjutkan Nuroji, program-program yang disusun atau dibentuk oleh pemerintah selama ini kurang menyentuh seluruh pemuda di Indonesia, terutama di daerah-daerah. Dalam membuat sebuah kegiatan misalnya, sekecil apapun kegiatan itu sangat sulit organisasi pemuda untuk

mencari dananya. Sehingga ruang gerak pemuda menjadi sangat sempit.

“Sekalipun ada, itu hanya seperti gerimis kecil saja, disiram kemudian hilang lagi,” tegasnya.

Oleh karena itu Nuroji menganggap akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung program-program yang dapat menggerakkan pembangunan kualitas kepemudaan. Bahkan untuk anggaran tahun 2015 Komisi X DPR RI sudah memberikan dukungan anggaran kepemudaan yang lebih besar dibanding anggaran olahraga.

“Semoga dengan meningkatnya anggaran untuk kepemudaan yang diberikan DPR, maka program-program yang disusun pemerintah dapat menyentuh pemuda yang ada di seluruh Indonesia,” harapnya. (Ayu), foto : eka hindra/parle/hr.

Kenaikan BBM Akan Berdampak Positif Majukan Sektor Riil di Pedesaan



Anggota DPR RI F-PDI Perjuangan I. Made Urip

Anggota DPR Made Urip mengakui kenaikan BBM yang diumumkan

Presiden Jokowi sebesar Rp 2.000 untuk jenis premium dan solar masing-masing menjadi Rp 8.500/liter dan Rp 7.500/liter memang akan berdampak buat petani dan nelayan. Namun, kenaikan ini nantinya akan memberikan ruang yang besar bagi fiskal dan APBN.

Nanti setelah kenaikan ini akan ada program-program infrastruktur untuk masyarakat di pedesaan yang sangat bermanfaat bagi para petani dan nelayan. Juga akan bermanfaat bagi perbaikan sektor irigasi yang sangat dibutuhkan kepentingan pertanian. “Jadi menurut saya kenaikan Rp2000 itu akan memperkuat fiskal dan APBN ke depan, yang penting bisa diarahkan

ke sektor-sektor produktif,” ujar politisi PDI Perjuangan saat ditemui di ruang kerjanya Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/11).

Made Urip mengatakan, dana dari kenaikan itu akan diarahkan untuk membangun sektor-sektor riil termasuk penambahan modal bagi pedagang sehingga akan berdampak bagi penguatan sektor ekonomi lainnya.

Karena itu menurutnya, bila dianggap kenaikan BBM ini akan memukul kehidupan petani dan nelayan tidak sepenuhnya benar. Bahkan dana kenaikan itu akan diarahkan bagi pembangunan infrastruktur yang bisa

meningkatkan produktifitas. Misalnya, kebutuhan pupuk maka petani dapat mendapatkan dengan mudah, juga benih akan dengan mudah didapatkan oleh para petani. Selain itu, jaringan irigasi bertambah baik, juga jalan-jalan semakin bagus sehingga dengan

mudah para petani memasarkan hasil panennya.

“Ke depan, menurut saya akan membawa dampak positif dan memajukan sektor riil di pedesaan,” ungkap Made. Apalagi, sejalan dengan kenaikan BBM

ini pemerintah langsung menggulirkan kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, adalah bentuk konkret pemberian kompensasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (mp), foto : iwan armanias/parle/hr.

Dua Kelompok di DPR itu Bagus

Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH memenuhi undangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memberikan masukan terkait kiprah Alat Kelengkapan Dewan ke depan. Dalam pertemuan di ruang rapat MKD, Senin (17/11) mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga memberikan catatan tentang perkembangan dua koalisi di DPR. Usai acara Parlemenaria melakukan wawancara untuk mengkonfirmasi sejumlah hal. Berikut petikannya;

Prof bagaimana pandangan soal dua koalisi di DPR, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP)? Menurut saya dua kelompok ini bagus, satu mendukung pemerintah dan satu lagi penyeimbang. Ada proses politik yang terjadi tetapi menurut saya kita harus sabar saja menghadapi proses ini.

Ada kelompok yang memborong jabatan di DPR mengambil hak rakyat dari partai pemenang pemilu? Itu bukan hak rakyat. Ini pimpinan DPR hanya memimpin rapat tidak terlalu penting amat dan nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Cuma kita menganggap ini proses transisi padahal tidak penting. Jadi kalau nanti kekuatan politik sudah terbentuk dua, kekuatan pemerintahan dan kekuatan penyeimbang di masa depan perlu kita arahkan rekayasa pimpinan dewan cukup dua, ketuanya mayoritas dan minoritas menjadi wakil. Jadi dua saja cukup. Komisi-komisi juga cukup dua saja pimpinannya, seperti di AS juga cuma dua karena itu fungsinya hanya memimpin rapat kok.

Jadi juru bicara, speaker ya? Iya speaker, Pimpinan DPR itu



Ketua MKD DPR Surahman Hidayat berjabat tangan dengan Prof Dr Jimly Asshiddiqie

juga terlalu banyak, jadi ini cenderung main gengsi-gengisan saja. Kalau sekarang ada wacana menambah satu lagi pimpinan itu kemunduran.

Soal wacana merevisi UU MD3? Mestinya tidak ada lagi revisi MD3 apalagi soal penambahan jabatan. Yang ada sekarang sebaiknya satu orang mengalah tapi ya sudah kalau ini dianggap solusi kita ikut saja, daripada DPR tersandera 5 tahun. (iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Anggota MKD John Kennedy Aziz

Mahkamah Kehormatan Dewan - MKD DPR RI mengundang Pakar Hukum Tata Negara Jimly Assiddiqie untuk menggali masukan dalam upaya

MKD Produk UU MD3 Terbaik

mengoptimalkan peran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru dibentuk ini. Setelah berubah menjadi Mahkamah ada sejumlah penyesuaian kalau dibandingkan pendahulunya Badan Kehormatan.

“Kita minta arahan informasi lengkap dari pakar yang menguasai peradilan dan ini pencerahan luar biasa. Kami takut salah kaprah dalam menjalankan peran sementara gebrakan

MKD sudah ditunggu masyarakat,” kata anggota MKD John Kennedy Aziz dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/14).

Bagi politisi Fraksi Partai Golkar ini, salah satu misi utama yang ingin dikedepankannya adalah pencegahan. Sedangkan tantangan utama bertugas di MKD adalah bagaimana menjaga independensi terutama dari pengaruh fraksi yang cukup kuat.

Prof. Jimly Assididqie menyebut ditengah kritikan publik terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ada hal positif yang menurutnya patut diapresiasi. “Ditengah banyak pertanyaan soal materi UU MD3 ada yang sangat bagus yaitu dimuatnya ketentuan tentang MKD,” paparnya.

Dalam UU MD3 diperkenalkan untuk pertama kali istilah mahkamah, dengan demikian resmilah agenda penegakan kode etik untuk menjaga kehormatan institusi masuk dalam ranah proses peradilan. Menurutnya dalam UUD 1945 pasal 24 memang yang disebut mahkamah itu hanya Mahka-

mah Agung dan Mahkamah Konstitusi tetapi badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bisa diadakan seperti diatur dalam pasal 24 ayat 3.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut perkembangan di dunia saat ini orang semakin sadar hukum pidana tidak bisa lagi diandalkan untuk mengatur manusia. Hukum semakin rumit, tidak efisien dan persidangan di pengadilan bisa memakan waktu 2 tahun sementara nama baik institusi tersandera.

“Masalah ini yang dijawab dengan peradilan etika, bagaimana menyela-

matkan nasib institusi karena jarang sekali putusan pengadilan bisa cepat. Jadi MKD ini proyek pertama DPR yang menggunakan istilah pengadilan. Saya harap bisa sukses dan mengubah wajah DPR,” kata dia.

Ia menyebut salah satu keberhasilan Komite Etik di Senat Amerika Serikat. Para senator yang terhormat itu sangat segan kepada lima orang anggota Komisi Etik yang berhasil menjalankan tugasnya menjaga wibawa pejabat publik. Saat ini menurutnya di 50 negara bagian AS sudah memiliki lembaga etik dan terus berkembang. (iky)/foto:iwan armanias/parle/hr.

Peran ARSADA dan PPNI Harus Ditingkatkan

Peran Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke depan harus ditingkatkan. Hal ini guna memperkuat kinerja pemerintah, agar pemerintah tidak bekerja sendiri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur kepada Parlemen usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait masukan ARSADA dan PPNI terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11/2014)

“Peran organisasi ini ke depan harus kita tingkatkan, agar pemerintah itu tidak bekerja sendiri. Jadi ada organisasi yang menyupport, yang memperkuat,” kata Asman.

Namun sampai saat ini, ujar Asman, kemandirian asosiasi ini dari sisi anggaran masih berusaha sendiri, tidak disupport pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat.

“Sehingga kalau mereka memperjuangkan hak anggotanya, hak keluarga besarnya masih menggunakan dana sendiri. Apakah itu iuran namanya atau apapun, sementara yang diperjuangkan ini adalah untuk kepentingan masyarakat,” jelas politisi



Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur

Partai Amanat Nasional ini.

Asman berjanji, akan membicarakan hal ini dengan Menteri Kesehatan RI saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR nanti.

Selanjutnya Asman menjelaskan tentang pelayanan kesehatan di Indonesia. Bahwa dari tahun ke tahun, kata Asman, pelayanan kesehatan di Indonesia meningkat, apalagi dengan adanya program BPJS. Tapi jika dibandingkan dengan negara lain, tentunya Indonesia masih tertinggal.

“Kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita capai ini, tapi kita

harus tingkatkan terus agar kita sejajar dengan negara-negara maju,” tegas Asman.

“Banyak permasalahan di lapangan, seperti tadi masih ada perawat yang mendapat upah dibawah UMK, ada yang gajinya belum sampai padahal hanya Rp 600.000. Bagaimana mereka akan meningkatkan mutu, sementara untuk hidupnya sendiri susah, gimana mau bantu orang lain, tidak mungkin, tentu ini menjadi tugas kita ke depan, khususnya di bidang kesehatan ini,” paparnya.

Melihat berbagai permasalahan yang disampaikan baik dari ARSADA maupun PPNI, Asman menyampaikan bahwa Komisi IX untuk periode ini akan lebih banyak ke lapangan, guna menyerap berbagai permasalahan.

“Istilah kerennya *blusukan*. Sehingga kita tahu permasalahan di bawah, tidak terlalu banyak rapat komisi, sehingga saat rapat-rapat komisi itu kita sudah memiliki bahan yang besar,” jelasnya.

Menurutnya, Komisi IX akan mengajukan kepada Pimpinan DPR agar anggaran kunjungan Spesifik dievaluasi kembali. (sc)/foto:naefurodji/parle/hr.

Konten Siaran TV Belum Penuhi Harapan Masyarakat

Komisi I DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Sensor Film (LSI) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dipimpin Ketuanya Machfudz Siddiq di Gedung Nusantara II Senayan, Senin(16/11) siang.

Mahfudz Siddiq mengatakan, dalam melakukan kemitraan selama 5 tahun kedepan dengan LSF maupun KPI, Komisi I akan mendengar mengenai hal-hal yang penting bersifat spesifik terkait langsung dengan kebutuhan komunikasi, informasi dan koordinasi.

Rapat kali ini kata Machfudz, tidak dihadiri oleh anggota dari fraksi Partai Golkar, mengingat partai tersebut saat sedang melakukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Yogyakarta. Namun tetap mengutus Dave Akbarshah Firkarno untuk mengikuti RDP ini.

Dalam paparannya, Ketua KPI Judha Riksawan menyadari konten siaran televisi saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Hal ini disebabkan diantaranya persaingan yang begitu ketat antara industri



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

penyiaran, stasiun televisi masih berorientasi kepada *rating*, dan lebih mengutamakan keuntungan. Akibatnya sering mengesampingkan idealisme, norma-norma agama, moral bahkan melanggar Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut Judha mengatakan, adakalanya kepentingan publik dikorbankan, termasuk anak-anak dan

remaja. Padahal spektrum frekuensi yang dipinjamkan kepada lembaga penyiaran merupakan milik publik yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik, yakni memberikan informasi, hiburan yang sehat, dan menjadi alat kontrol dan perekat sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, lanjut Judha, KPI harus bersinergi dengan semua pihak pemangku kepentingan penyiaran diantaranya dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan juga seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan penyiaran Indonesia yang cerdas, sehat dan bermatabat.

Dengan kata lain, tanggung jawab terhadap urusan penyiaran menjadi tanggung jawab bersama KPI, pemerintah, pengelola lembaga penyiaran, pengurus ormas, organisasi pemuda, dan semua elemen di masyarakat. "Saat ini penyiaran sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat," kata Judha. (Spy)/foto:andri/parle/iw.

Komisi III Awasi Kasus Kematian Tahanan Polsek Sukodono



Tim Kunjungan Spesifik Komisi III saat pertemuan di ruang Kapolsek Sukodono, Sidoarjo

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai kasus tewasnya salah seorang tahanan di Polsek Sukodono bernama M. Imron Zainudin, Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI yang dipimpin Desmon J. Mahesa mendatangi Mapolsek Sukodono, Sidoarjo Jawa Timur dan diterima Kapolsek Sukodono AKP Tego Marwoto di ruangannya, Sabtu (15/11). Selanjutnya tim menerima paparan kuasa hukum keluarga Imron mengenai kronologis kejadian hingga tewasnya korban. Dalam perbincangan tersebut Desmon mengatakan akan mendampingi penyidikan kasus tewasnya Imron hingga tuntas.

"Ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum di Indonesia. Kami di sini sebagai Komisi III, akan melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan yang sudah dilakukan Polres Sidoarjo, Jangan sampai ada pandangan proses penegakan hukum yang pilih kasih," ujar Desmon yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III ini.

Usai dari Polsek Sukodono Tim Kunjungan Spesifik bersilaturahmi ke rumah korban sekaligus menyampaikan santunan kepada keluarga. Dalam kesempatan ini para anggota dewan berdialog dan menerima aspirasi dari ibu korban, yang berharap kasus kematian Imron bisa cepat selesai dan terungkap jelas perkara yang sebenarnya.

Dari rumah duka, rombongan komisi melakukan pertemuan dengan Kepala

Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Anas Yusuf, Kapolres Sidoarjo AKBP Anggoro Sukartono dan jajarannya di Mapolres Sidoarjo untuk mendapatkan paparan jalannya kasus ini.

“Polda Jawa Timur akan selalu bekerjasama dan menjalin komunikasi terkait pengusutan kasus tersebut. Segala perkembangan, jalannya perkara ini harus melalui proses yang transparan melibatkan berbagai pihak

dan disampaikan langsung kepada Komisi III, sehingga semua bisa tahu kebenarannya” ungkap Desmon usai melakukan pertemuan.

Lebih lanjut mengenai temuan tim di lapangan, Komisi III masih akan mendalaminya sehingga tidak sekedar menjadi asumsi, serta meminta segala pihak untuk tetap menjaga situasi di Sukodono, Sidoarjo dalam kondisi yang tenang dan kondusif. (ray) foto: rizka/parle/ry

Profesor Terjerat Narkoba Coreng Dunia Pendidikan

Kasus penangkapan dua dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Prof Dr Musakkir SH MH dan Ismail Alrif SH MKN oleh polisi karena nyabu di salah satu hotel di Makassar, Jumat (14/11/2014) dini hari lalu, dinilai mencoreng dunia pendidikan Indonesia.

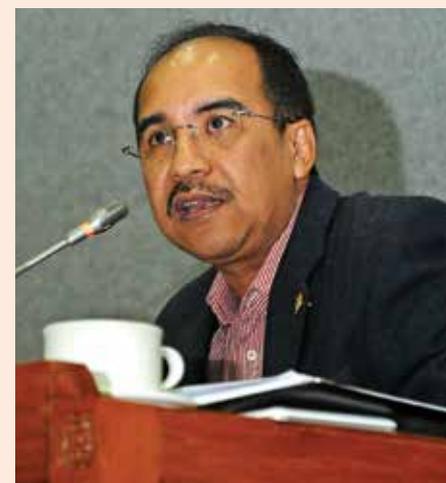
Pasalnya, keduanya merupakan pendidik, yang seharusnya mengajarkan hal-hal positif. Sepatutnya, keduanya juga menjadi panutan bagi mahasiswa maupun masyarakat. Demikian diungkapkan Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore.

“Kejadian ini memalukan dunia pendidikan. Orang yang dianggap pro-

fessor adalah orang yang dihormati, dan mendapat kehormatan khusus di dunia pendidikan. Kejadian ini sangat mencoreng dunia pendidikan,” sesal Jefirstson, saat ditemui di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (17/11/14).

Politisi Demokrat ini menambahkan, kejadian ini memberikan pelajaran berharga bagi para pendidik, bahkan orang-orang yang sudah bertitel professor, agar lebih hati-hati dalam bertindak.

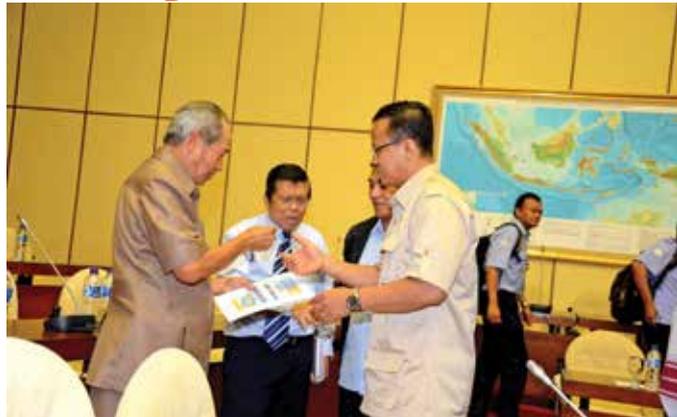
“Ini kan pengajar yang seharusnya mencontohkan yang baik, tapi malah memberikan contoh yang buruk. Ini



Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore

pukulan berat buat dunia pendidikan Indonesia,” imbuh Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur ini. (sf)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Komisi IV Pertanyakan Arah Kebijakan Dewan Kelautan Indonesia



Ketua Komisi IV Edhi Prabowo (F-Partai Gerindra) berbincang dengan Pengurus DEKIN

Komisi IV DPR RI mempertanyakan Rencana Kerja dan arah kebijakan Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) 2014-

2019, sehingga pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dapat segera diimplementasikan dan dapat bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.

Komisi IV DPR RI yang membidangi Kelautan meminta Dewan Kelautan Indonesia agar dalam merekomendasikan bahan kebijakan dapat mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga bidang kelautan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional untuk mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, maju dan mandiri.

Mendayagunakan sumber daya kelautan demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. “Undang Undang tentang Kelautan ingin menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim,” kata Ketua Komisi IV Edhi Prabowo (F-Partai Gerindra), saat me-

mimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DEKIN, Senin (17/11), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Titiek Soeharto menanyakan mengenai Program Tol Laut yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu andalan pemerintahannya. “Program tol laut itu seperti apa?” tanya Titiek Soeharto.

Menurut anggota Dekin dari Kementerian Perhubungan Agus Edi Susilo, Tol Laut itu seperti jalan bebas hambatan yang berada di perairan Indonesia.

“Program ini ingin mewujudkan transportasi laut yang lancar, jadi lebih kepada soal akses konektivitas. Bila berjalan lancar, maka tol laut akan mengurangi biaya logistik,” kata Agus.

Namun, setidaknya ada beberapa soal penting terkait program itu, seperti kinerja pelabuhan yang belum mem-

baik, belum memperkuat dunia kepelayaran.

“Percuma pelabuhan diperbaiki tapi dunia kepelayaran tidak diperbaiki. Kemudian, yang tak kalah penting adalah soal disparitas harga antar kawasan. Kapal yang ke Sorong, Papua, biasanya pulangnya kosong. Ini perlu didukung oleh kawasan industri yang terintegrasi,” jelasnya.

Sekretaris Dekin yang juga Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekologi dan Sumber Laut Dedi Sutisna, menjelaskan bahwa Dekin memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijakan umum bidang kelautan.

“Grand Strategy pembangunan nasional bidang laut, antara lain kebijakan ekonomi kelautan, kebijakan tata kelola kelautan, kebijakan pertahanan keamanan dan keselamatan di laut, kebijakan budaya bahari, dan kebijakan lingkungan laut,” jelasnya. (as) foto: rizka/parle/hr.

Komisi V Ingin PT. KBN Jalin Kerjasama dengan PT. Pelindo



Anggota Komisi V Epyardi Asda didampingi Ketua Komisi V Fary Djemi Francis

Komisi V DPR RI menginginkan PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dapat menjalin kerjasama dengan PT. Pelindo, dalam rangka membantu mengatasi fenomena jaringan dimana beban yang ditanggung melebihi kapasitas jaringan (kongesti) Pelabuhan Tanjung Priok.

Anggota Komisi V Epyardi Asda melihat pengembangan pelabuhan di Marunda dapat dibangun dengan suatu kerja sama antara PT KBN dan PT Pelindo, sehingga tidak perlu terjadi kompetitor dengan PT. Pelindo. “Saya berharap PT. KBN jangan menjadi kompetitor PT. Pelindo, tetapi jadilah partner yang baik sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dimana Kapal-kapal yang tidak bisa tertangani Pelabuhan Tanjung Priok bisa dikerjasamakan pada PT. KBN,” katanya, saat mengunjungi lahan pembangunan dermaga PT. KBN, di Marunda, Kamis (20/11).

Patut diketahui, PT. KBN semula menangani penyewaan lahan untuk pergudangan dan lahan ekspor-impor. Namun dalam perkembangannya berencana ingin membangun dermaga sepanjang 1.500 meter yang ditaksir rampung pada tahun 2015. Nilai investasi Rp.2,1 Triliun.

Menurut Epyardi, kawasan yang dikuasai oleh PT. KBN, perlu mendapatkan perhatian dari Komisi V. Sebagaimana amanah dari UU No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selain dari PT. Pelindo atau BUMN juga diperbolehkan badan hukum yang lain, tetapi ada juga syaratnya yaitu dalam jarak 70 mile dari area yang telah dikelola oleh PT. Pelindo.

“Jangan sampai terjadi kompetisi yang tidak sehat. Bagaimanapun juga PT. Pelindo sebagai operator sesuai dengan UU tentang Pelayaran Pasal 344 ayat c, dimana diberikan konsesi sejak awalnya sebagai pelimpahan wewenang regulator,” jelasnya.

Dia melihat kawasan marunda ini perlu dikembangkan dalam rangka membantu mengatasi kongesti pelabuhan tanjung priok. Adanya lahan PT. KBN yang sangat luas dapat dijadikan sebuah pelabuhan untuk menopang pelabuhan tanjung priok sehingga kepadatan yang ada di tanjung priok dapat terurai dengan adanya pelabuhan ini.

“Karena PT. Pelindo dan PT. KBN adalah sama-sama merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedangkan Kementerian Perhubungan adalah regulatornya, saya harap Pemerintah dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut bisa mendamaikan atau mensinkronkan antara PT. Pelindo dan PT. KBN supaya dapat saling bekerjasama,” tegasnya. (as) foto: agung sulistiono/parle/hr.



Komisi V DPR RI dipimpin Fary Djemi Francis mengunjungi terminal Kalibaru dan Terminal Marunda dalam rangka meninjau kesiapan menghadapi Poros Maritim, Kamis (21/11) Foto: Naefurodjie/Parle



Audiensi Komisi V DPR RI dipimpin Fary Djemi Francis dengan DPP Organda mengenai aksi keprihatinan Organda terhadap kenaikan harga BBM, Rabu (19/1) di Ruang Rapat Komisi V. Foto: rizka/parle



Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan Lembaga Sensor Film membahas konten siaran televisi yang belum memenuhi harapan, Senin (17/11) Foto: Andri/Parle